

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK AYAM POTONG DI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh

Diyah Rosita Heni
NIM. 2005040001

ABSTRAK

Produk halal tidak hanya menjadi kewajiban moral dan religius, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hadir sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada produk ayam potong di Kota Tanjungpinang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris dengan sifat deskriptif melalui pendekatan sosiologis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha ayam potong terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah serta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terdapat ketidaksinkronan data antara instansi terkait yang menunjukkan lemahnya koordinasi dalam hal pengawasan dan pendataan rumah potong ayam di Kota Tanjungpinang. Analisis melalui teori kepatuhan, diketahui bahwa pelaku usaha ayam potong di Kota Tanjungpinang belum patuh akan aturan tersebut. Kewajiban Bersertifikat halal di wilayah Tanjungpinang belum efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu: Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten khususnya penyelia halal yang tersertifikasi; Kurangnya sosialisasi dan informasi sehingga banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa proses sertifikasi halal kini dapat dilakukan secara lebih mudah, murah, dan bahkan gratis bagi usaha mikro dan kecil; Asumsi keliru bahwa proses sertifikasi halal memerlukan prosedur yang panjang dan biaya yang besar; Selanjutnya kebiasaan konsumen dan motif ekonomi.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, Ayam Potong

**LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE HALAL
PRODUCT ASSURANCE LAW ON SLAUGHTERED CHICKEN PRODUCTS
IN TANJUNGPINANG CITY**

By:
Diyah Rosita Heni
NIM. 2005040001

ABSTRACT

Halal products not only uphold moral and religious principles, but they also provide legal protection for buyers. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal is formed as part of the government's efforts to provide Muslim consumers with legal and keamanan protection. The purpose of this study is to examine how the laws governing the production of halal products in Kota Tanjungpinang are applied to ayam potong products and to identify the challenges faced by businesses in obtaining halal certification. This study uses empirical normative data with deskriptif sifat through sociological approach. This study employs the Soerjono Soekanto kepatuhan hukum theory. The results of the study indicate that the level of compliance of the ayam potong business owners with regard to the halal certification and requirements is still relatively low and does not fully comply with the applicable regulations. In addition, there is a lack of coordination in the maintenance and data collection of ayam potong rumah in Kota Tanjungpinang, which is indicated by the data collected by the relevant institutions. The study's findings indicate that the ayam potong industry has not yet fully complied with the rules governing their operations and their adherence to halal certification and standards. In addition, there is a lack of coordination in the maintenance and data collection of ayam potong homes in Kota Tanjungpinang, which is indicated by the data ketidaksinkronan between the relevant institutions. According to the aforementioned theory of kepatuhan, the ayam potong business in Kota Tanjungpinang has not yet reached the perfect level of performance. In addition, the need to get halal certification in Tanjungpinang is ineffective due to a few reasons, such as: a decrease in the quality of human life, especially halal certification; Lack of communication and information means that many business owners are unaware that halal certification may now be done more easily, discreetly, and even for free for small and micro businesses. In addition, it is assumed that halal certification requires a panjang and mahal process, as well as consumer and economic motivation

Keywords: Halal Product Assurance, Halal Certification, Slaughtered Chicken